

BAB V

KESIMPULAN

Konflik yang bermula pada 12 Februari 2013 merupakan sejarah konflik terbesar yang pernah terjadi di Negeri Malaysia. Hari itu pula di tandai dengan masuknya segerombolan pasukan yang berasal dari kesultanan Sulu yang di pimpin langsung oleh Radja Muda Agbimudin Kiram, atas dasar mandat dari Sultan Sulu Jamalul Kiram III. Pasukan-pasukan itu datang menggunakan kapal cepat dan langsung menduduki sejumlah wilayah di Sabah Malaysia, mereka datang untuk merebut "*kembali*" Negeri Sabah dari tangan Pemerintah Malaysia. Pihak Kesultanan Sulu beranggapan bahwa sabah dulunya adalah wilayah mereka, dan selama bertahun-tahun Malaysia hanya "*menyewa*" kepada Sultan Sulu. Pedoman mereka adalah perjanjian tanggal 22 Januari 1878, antara Sultan Sulu dengan Baron de Overbeck, yang intinya pemberian kuasa kepada Baron De Overbeck untuk mengelola Sabah, tetapi hanya berstatus sewa, kemudian ada sejumlah uang yang harus dibayarkan tiap tahun kepada Sultan Sulu.

Kemudian masalah ini mulai muncul ketika Pemerintah Malaysia, mengklaim bahwa Sabah adalah milik mereka sesuai referendum tahun 1963. Dan hal itu diakui secara sah oleh dewan PBB dan negara-negara lain. Saat itu pula mulai ada respon dari Kesultanan Sulu, yang kemudian meminjam tangan Pemerintah Filipina, agar membantu Sultan Sulu untuk menuntut hak atas wilayah Sabah. Tetapi...

yang dilakukan tidak pernah membuahkan hasil hingga puluhan tahun lamanya, bahkan sekarang sampai pada masa Pemerintahan Presiden Benigno Aquino tahun 2010. Klaim Kesultanan Sulu terhadap wilayah Sabah tidak pernah di tanggapi secara serius oleh Pemerintah Filipina. Selain itu Kesultanan Sulu juga tidak pernah diikutkan dalam perundingan damai antara Pemerintah Filipina dengan MILF, padahal mereka memiliki harapan besar untuk itu, karena secara tidak langsung konflik yang terjadi sedikit banyak juga melibatkan orang-orang Sulu dan wilayah Sulu itu sendiri. Sulu seakan di pinggirkan dari peta politik Filipina, karena aspirasi mereka tidak pernah tersampaikan.

Datangnya segerombolan pasukan Sulu di wilayah Lahad Datu, Sabah tentu menarik perhatian Pemerintah Malaysia. Dengan cepat pula pihak keamanan Malaysia pada tanggal 13 Februari 2013 mengumumkan kepada masyarakat dan media massa Malaysia, bahwa telah datang pemberontak asal kepulauan Sulu yang ingin merebut kembali wilayah Sabah dari tangan Pemerintah Malaysia. Aksi tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak terutama dari para petinggi di Malaysia. PM Malaysia Najib Razak dan Menteri Pertahanan Ahmad Zahidi Hamid segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengatasi hal ini, kedua petinggi Malaysia tersebut memerintahkan agar segera dibentuk operasi militer secara besar-besaran agar para pejuang segera menyerahkan diri dan kembali ke negara asal.

Operasi militer pun dibentuk Pemerintah Malaysia. Yang diberi nama Operasi

Daulat operasi militer ini merupakan gabungan dari 3 kelompok besar yang dimiliki

Malaysia yaitu Angkatan Tentara Malaysia (terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara), Polisi Diraja Malaysia dan Pasukan Intelejen, kesemuanya itu tentu sudah dilengkapi persenjataan yang lengkap dan mutakhir. Kemudian dibentuknya ESSCOM, atau *East Sabah Security Command* merupakan operasi keamanan yang fokus pada daerah pantai timur Sabah. Bertujuan untuk mencegah kegiatan pemberontakan oleh pejuang Sulu di perairan Sabah serta mengamankan perdagangan di sepanjang perairan Sabah. Yang terakhir, Pemerintah Malaysia membentuk ESSZONE, *Eastern Sabah Security Zone* bisa juga diartikan sebagai kawasan atau zona keamanan di wilayah timur Sabah. ESSZONE merupakan pemetaan daerah konflik yang masuk zona merah atau kawasan yang memberlakukan operasi darurat militer, zona-zona inilah yang nantinya dimasuki oleh Tim Operasi Daulat untuk menggempur para pemberontak Sulu.

Kebijakan luar negeri Pemerintah Malaysia adalah mengusahakan agar Sultan Sulu, Jamalul Kiram III dapat di adili di negara asalnya, Filipina, jika Pemerintah Filipina tidak sanggup melakukan *punishment*, maka Pemerintah Malaysia meminta kepada Pemerintah Filipina agar Sultan Sulu di ekstradisi ke Malaysia dan di adili di pengadilan Malaysia.

- **Tanggapan**

Penulis beranggapan bahwa konflik ini hanyalah luapan emosi yang
terakumulasi selama berabad-abad tahun lamanya. Kesultanan sulu ingin

menunjukkan kepada Pemerintah Filipina bahwa mereka juga memiliki *power*, mereka sanggup melakukan perlawanan. Walaupun Sultan Sulu juga pasti telah memprediksikan konsekuensinya, karena mereka berhadapan dengan sebuah Negara bangsa yang memiliki *power* cukup besar pula.

Muncul anggapan lain dari para pengamat politik di Malaysia, bahwa konflik tersebut erat kaitanya dengan pelaksanaan Pemilu Raya di Malaysia untuk pemilihan Perdana Menteri Malaysia, secara kebetulan kejadian tersebut menjelang Pemilu Raya yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2013. Ada beberapa isu bermunculan yang menganggap bahwa konflik tersebut didalangi oleh Anwar Ibrahim, sebagai kandidat calon Perdana Menteri Malaysia bersaing dengan PM Najib Razak dari Barisan Nasional (BN).

Akhir konflik ini pun semakin tidak jelas arahnya, sedikit demi sedikit mulai terlihat samar tanpa penyelesaian. Seperti yang digambarkan KJ Holsti, sebuah penyelesaian konflik tidak harus diakhiri dengan kompromi atau negosiasi, dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik secara pasif bisa juga terjadi, hal tersebut terjadi ketika konfrontasi militer sudah dianggap menjadi jalan satu-satunya dalam menyelesaikan konflik.

- **Rekomendasi**

Penulis ingin memaparkan tentang resolusi konflik untuk mengakhiri sengketa

wilayah di Nagari Sabah. Dalam buku Holsti, mengemukakan tentang beberapa

penyelesaian yang mungkin dicapai sebagai akibat dari konflik internasional, didalamnya memuat poin-poin penting yang dikutip dari buku Kenneth E. Boulding, tahun 1962⁸⁶. Beberapa poin penting tersebut antara lain, Yang pertama, penaklukan. Tindakan tersebut mengharuskan penggunaan kekuatan militer secara penuh untuk menaklukan lawan. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan argumen dari Coser lewat jurnal ilmiahnya⁸⁷, ia mengatakan bahwa perdamaian, bahkan dengan istilah penyerahan tanpa syarat, lebih dikehendaki daripada kelangsungan konflik, kesadaran ini muncul setelah salah satu pihak mencapai konfrontasi militer secara simbolik. Jika dikaitkan dengan upaya gencatan senjata yang dilakukan oleh Sultan Jamalul Kiram III memang sedikit cocok, Setelah konfrontasi militer pada awal maret 2013 Sultan Sulu mengajak untuk negosiasi ulang menghentikan pertikaian di Sabah. Konfrontasi militer tersebut mungkin menelan jumlah korban jiwa yang banyak pada Sultan Sulu, oleh karena itu lahirlah pernyataan gencatan senjata. Tetapi sayangnya pintu negosiasi untuk para pejuang Sulu sudah ditutup, Pemerintah Malaysia akan menyapu bersih sisa-sisa penyusup yang masih bertahan.

Kedua, penyelesaian pasif. Sering sekali sebuah konflik internasional tidak mempunyai hasil akhir yang bersifat formal (seperti kompromi, penyerahan diri,

⁸⁶ Kenneth E. Boulding, *Conflict and Defense* (New York : Harper & Row, 1962. Dikutip dari buku Holsti, K.J. , terjemahan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional : Kerangka untuk analisa, edisi keempat jilid 2. Airlangga, 1988.hlm 180*

⁸⁷ Lewis A. Coser, "The Termination of Conflict, "Jurnal of conflict Resolution, 5 (1961), 349. Dikutip dari buku Holsti. K.I terjemahan M. Tahir Azhary. *Politik Internasional : Kerangka untuk analisa, edisi keempat*

pemberian imbalan, dll) tetapi bertahan selama jangka waktu yang lama sampai para pihak secara tegas menerima secara tegas *status quo* yang baru sebagai sesuatu yg absah. *Quency Wright* juga telah mengemukakan bahwa kebanyakan konflik berakhir karena menjadi usang⁸⁸. Penulis beranggapan bahwa konflik ini berakhir dengan penyelesaian pasif, upaya-upaya resolusi konflik di Sabah hanya sebatas pada keinginan untuk bernegosiasi dan pada akhirnya konflik ini berakhir dengan sendirinya, Malaysia dengan tetap mempertahankan *Status Quo* nya sedangkan Sultan Sulu menarik semua tuntutananya dan para pejuangnya dikirim kembali pulang ke kampung halaman masing-masing. Intensitas konflik mulai terlihat kabur sedikit demi sedikit.

⁸⁸ Wreight, "A Study of War", pp. 1256-57. Dikutip dari buku Holsti, K.J. , terjemahan M. Tahir Azhary,